

Plagiarism Scan Report



Characters:6805

Words:868

Sentences:40

Speak Time:
7 Min

Excluded URL

None

Content Checked for Plagiarism

1. PENDAHULUAN Daya saing antar wilayah menjadi suatu barometer bagi pembangunan daerah yang diukur bukan hanya berdasarkan tingkat produksi semata, tapi juga dari berbagai elemen dan peran. Pengukuran daya saing dengan menggunakan PDRB atau pertumbuhan ekonomi tidak dapat dijadikan acuan utama dalam penentuan progres pembangunan suatu wilayah melalui daya saingnya karena pertumbuhan ekonomi cenderung tidak memperhatikan inklusivitas terhadap aspek-aspek terkait secara menyeluruh. Pembangunan menyentuh berbagai aspek yang bersifat inklusif dalam tatanan hidup masyarakat diantaranya ekonomi, sosial, infrastruktur maupun kondisi lingkungan. Hal ini menghasilkan pengukuran daya saing wilayah yang lebih komprehensif. Identifikasi daya saing regional sebagai konsep ganda menurut (Huggins et al., 2014) memiliki perbedaan relatif dalam tingkat perkembangan ekonomi antar daerah dan pemerataannya. Peningkatan taraf hidup setiap daerah, baik secara lokal maupun nasional, dalam upaya memperkuat daya saing suatu daerah (Bagianto et al., 2020). Pengukuran daya saing wilayah yang ada saat ini masih lebih banyak menggunakan PDRB yang diformulasikan dengan komparasi sektor-sektor yang berkontribusi dalam pembentukan PDRB itu sendiri (Affandi, 2020). PDRB yang menjadi indicator pertumbuhan ekonomi regional di suatu wilayah. Peningkatan pertumbuhan ekonomi menyebabkan meningkatnya ketimpangan pendapatan dan jumlah penduduk miskin provinsi-provinsi di Indonesia (Istiqamah, 2018). Menurut OECD (Organization for Economic Co-operation and Development) ukuran agregat, seperti daya saing, industrialisasi, keberlanjutan, dan 2 integrasi pasar, tidak dapat diukur oleh satu indikator saja. Sebaliknya, mereka harus diukur diberbagai sektor, termasuk PDRB, Rasio Gini, Kemiskinan, infrastruktur dan lingkungan (OECD, 2008). Gambar 1. Skema Pengukuran Daya Saing Wilayah Berbasis Indeks Pembangunan Daerah Penelitian ini, peneliti mengukur daya saing wilayah menggunakan indeks pembangunan daerah. Pengukuran indeks pembangunan daerah melibatkan berbagai indikator yang lengkap, tidak hanya PDRB tapi juga Indeks Pembangunan Manusia, Tingkat Kemiskinan, Pengangguran Terbuka, Rasio Gini, infrastruktur dan aspek lingkungan. Berbeda dengan penelitian sebelumnya (Affandi, 2020), selain aspek ekonomi social dan infrastruktur, penelitian ini telah memasukkan aspek lingkungan di dalamnya. Pertumbuhan ekonomi yang inklusif tidak hanya sekedar mengutamakan tujuan akhir pada output

yang mengalami pertumbuhan atau peningkatan semata. Namun, lebih cenderung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat yang terukur melalui penurunan angka pengangguran, disparitas atau kesenjangan, kemiskinan, pemerataan akses pendidikan, kesehatan serta perbaikan lingkungan (Safitri, 2021). Selain itu, pengukuran daya saing wilayah ini tidak menggunakan acuan wilayah yang berada di daerah tingkat I (DATI I), namun menggunakan teknik pembobotan dan perengkingan. Hal inilah yang menjadi daya tarik bagi peneliti untuk melakukan pengukuran daya saing wilayah melalui indeks pembangunan daerah dengan menggunakan alat analisis Composite Performance Index (CPI). Dalam pengukuran ini akan menggunakan berbagai indikator yang lebih lengkap dari pengukuran-pengukuran sebelumnya dan menghasilkan suatu indeks yang dapat menggambarkan daya saing wilayah yang menjadi objek pengukuran.

2. METODE PENELITIAN Penelitian ini menggunakan data sekunder yang berasal dari Badan Pusat Statistik dan Dinas Lingkungan Hidup tahun 2022 dan 2023. Metode penelitian yang digunakan yakni kuantitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi dan studi Pustaka. Teknik analisis data menggunakan Composite Performance Indeks (CPI). Penelitian Anto Tri Susilo menunjukkan bahwa pendekatan CPI merupakan cara menghitung pengambilan keputusan berdasarkan indeks kinerja gabungan yang dapat digunakan untuk menghasilkan peringkat atau peringkat dari berbagai alternatif (i) berdasarkan sejumlah kriteria (j). Pendekatan CPI diterapkan pada evaluasi yang menggunakan kriteria tidak baku. Dalam teknik CPI, rumus berikut digunakan untuk menghitung penilaian atau pemeringkatan pilihan (i) yang berbeda berdasarkan sejumlah kriteria (j) dari berbagai alternative (i) (Susilo, 2017). Berdasarkan beberapa kriteria (j) pada metode CPI adalah sebagai berikut: Keterangan: A_{ij} = Nilai alternatif ke-i pada kriteria ke-j $X_{(i,j)}$ = Nilai ke-I pada kriteria ke-j $\min(X_j)$ = Nilai minimum pada kriteria ke-j $A_{(i+1,j)}$ = Nilai alternatif ke-i+1 pada kriteria ke-j $X_{(i+j)}$ = Nilai ke-i+1 pada kriteria ke-j P_j = Bobot kepentingan kriteria ke-j I_{ij} = indeks alternatif ke-I pada kriteria ke-j I_i = Indeks gabungan kriteria pada Alternatif ke-i $I = 1,2,3,\dots,n$ $J = 1,2,3,\dots, m$ Menurut (Dahlan et al., 2022) Prosedur di CPI diuraikan sebagai berikut: a. Identifikasi kriteria tren positif (semakin tinggi nilainya semakin baik) dan tren negatif (semakin rendah nilainya semakin baik). b. Nilai minimum pada setiap kriteria ditransformasi menjadi 100 untuk kriteria tren positif, sedangkan nilai lainnya ditransformasikan secara proporsional lebih tinggi. c. Nilai minimum pada setiap kriteria tren negatif ditransformasi keseratus, sedangkan nilai lainnya ditransformasikan secara proporsional lebih rendah. d. Hasil perkalian nilai kriteria dengan bobot kriteria inilah yang menjadi perhitungan nilai alternatif. Berikut langkah-langkah dalam menyusun indeks komposit yaitu sebagai berikut: 1. Kajian literasi indikator daya saing daerah 2. Penentuan tren dan pembobotan 3. Penentuan nilai minimum 4. Analisis tren 5. Indeks Alternatif 6. Composite performance index (CPI) 7. Grafik Composite Performance Index 8. Grafik radar distribusi pembangunan daerah Teknik Composite Performance Index yang menggunakan perhitungan dari pengambilan keputusan berbasis indeks kinerja digunakan untuk evaluasi dengan kriteria yang tidak konsisten.

Indeks komposit dapat digunakan untuk memberi peringkat atau memutuskan diantara alternatif yang berbeda berdasarkan sejumlah faktor. Istilah berikut juga digunakan untuk menggambarkan proses dalam indeks kinerja gabungan. Gunakan tren positif (nilai lebih tinggi berarti lebih baik) dan kriteria deteksi tren negatif digunakan (nilai lebih rendah artinya semakin baik). Untuk kriteria trending positif, nilai minimal pada setiap kriteria dikonversi menjadisuatu persen/keseratus, sedangkan nilai lainnya dikonversi secara proporsional lebih tinggi. Untuk kriteria tren negatif, nilai minimum untuk setiap kriteria dikonversi satu persen/keseratus, dan nilai dikonversi lebih rendah. Perhitungan nilai alternatif/pengganti merupakan hasil perkalian antara nilaistandar dengan bobot standar. Perhitungan Bayes digunakan untuk memutuskan bagaimana mengukur alternative (Muryono et al., 2022).

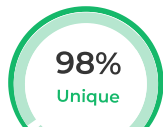
Sources



[Home](#) [Blog](#) [Testimonials](#) [About Us](#) [Privacy Policy](#)

Copyright © 2024 [Plagiarism Detector](#). All right reserved

Plagiarism Scan Report



Characters:7288

Words:996

Sentences:45

Speak Time:
8 Min

Excluded URL

None

Content Checked for Plagiarism

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 1. Indikator Pengukuran Dalam pengukuran ini, digunakan 11 (sebelas) indikator yang diturunkan dari 4 (empat) aspek diantaranya aspek ekonomi, sosial, infrastruktur dan lingkungan. Adapun indikator yang digunakan dalam pengukuran dapat dilihat pada table 1 dibawah ini : Tabel 1. Indikator Pengukuran Daya Saing Wilayah Se Luwu Raya Tahun 2022 Dari sebelas indicator inilah diukur dengan metode composite performance index. Rata-rata data memiliki satuan persen (%) dan 1 data dengan satuan rupiah yakni pendapatan perkapita dan 1 data bersatuan kubikasi (meter kubik) yakni penyaluran air bersih. Namun hal ini tidak mempengaruhi hasil dari pengukuran ini karena penggunaan satuannya sama dan berlaku pada semua wilayah pengukuran. Data-data ini diperoleh dari berbagai sumber diantaranya badan pusat statistik, website pemerintah daerah dan dinas lingkungan hidup di masing-masing wilayah pengukuran.

2. Trend dan Pembobotan Untuk menentukan bobot masing-masing indikator, studi pustaka digunakan dengan mengukur masing-masing indikator secara teori, sehingga diperoleh hasil seperti pada tabel 2. di bawah ini : Tabel 2. Teori Indikator No. Referensi Teori 1 (BPS, 2010) Bappenas pada tahun 2009 bekerjasama dengan BPS menyusun indeks pembangunan daerah dengan menggunakan dimensi Ekonomi, Sosial, Prasarana dan Pelayanan Publik, Kualitas Lingkungan Hidup, Teknologi, Komunikasi dan Informasi sebagai variabel pendukung daya saing daerah 2 (Sudiharta & Sutrisna, 2013) Human capital, socio-institutional capital dan infrastruktur merupakan faktor-faktor yang berpengaruh positif terhadap daya saing daerah. Dalam studi ini, daya saing diproyeksikan dengan PDRB per kapita, produktivitas tenaga kerja dan tingkat kesempatan kerja 3 (Huda & Santoso, 2014) Penelitian tentang daya saing daerah di Jawa Timur, diperoleh hasil bahwa daerah perkotaan didominasi oleh sektor Produktivitas Sekunder, Produktivitas Tersier, Sumber Daya Manusia dan Ketenagakerjaan, Infrastruktur dan Infrastruktur, serta sektor yang tidak berasal dari alam. Di wilayah Kabupaten, memiliki keunggulan di sektor Produktivitas Primer, dan sektor yang terkait dengan sumber daya alam. 4 (Furman, 2015) Faktor-faktor pendukung daya saing adalah: infrastruktur sosial (kesehatan dan pendidikan) dan lembaga politik (kualitas lembaga politik dan supremasi hukum), kebijakan moneter dan fiskal dan lingkungan ekonomi mikro. Selain itu, daya tarik investasi juga mempengaruhi daya saing suatu negara. 5 (Kementerian Dalam Negeri, 2016) Indikator daya saing daerah terdiri dari

kemampuan ekonomi daerah, sarana atau prasarana daerah, iklim investasi dan sumber daya manusia 6 (Rosińska-Bukowska, 2016) Indikator daya saing daerah sebagaimana tercantum tercermin dalam kemampuan suatu daerah untuk menghasilkan pendapatan yang tinggi dan meningkatkan mata pencaharian masyarakat di daerah tersebut. Dari hasil pembobotan menggunakan metode perengkungan berdasarkan kajian literasi, diperoleh hasil sebagai berikut: Tabel 3. Tren dan Pembobotan Dari hasil pembobotan tersebut, indikator pengangguran dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) memiliki bobot terbesar, yaitu 0,13. Disusul pendapatan perkapita, harapan lama sekolah dan kondisi jalan mantap sebesar 0,10 dan indikator lainnya berbobot 0,8. Hal ini menandakan bahwa skala indikator pembangunan yang perlu mendapat perhatian khusus tidak hanya terkait dengan aspek ekonomi, namun aspek sosial seperti pengangguran dan pendidikan juga perlu menjadi skala prioritas pembangunan di Luwu Raya.

3. Analisis Tren Data

yang diperoleh dari hasil pengumpulan data dari berbagai indikator, kemudian diolah berdasarkan nilai terkecil atau nilai minimum masing-masing data. Hal ini dapat dilihat pada tabel 4 dibawah ini : Tabel 4. Determinasi Nilai Minimum Kemudian dari data ini, data analisis tren ditentukan dengan menggunakan data yang telah ditentukan dan nilai minimum. Hasil analisis tren ini dapat dilihat pada tabel 5 di bawah ini: Tabel 5.

Analisis Trend

Dari hasil analisis tren di atas, ditentukan indeks alternatif data. Indeks alternatif dapat dilihat pada tabel 6. Di bawah ini : Tabel 6. Indeks Alternatif Hasil standardisasi data diperoleh skor yang sama pada rentang 0-100. Secara rata-rata, skor semua indikator adalah 10,85, dengan skor rata-rata tertinggi adalah indikator jalan mantap atau infrastruktur sebesar 20,63. skor rata-rata terendah sebesar 5,50 yakni indikator kemiskinan. Data menunjukkan bahwa masalah jalan mantap atau infrastruktur tidak begitu signifikan di Luwu Raya, tetapi pembangunan perlu difokuskan pada program penanggulangan kemiskinan yang disinkronkan dengan ketimpangan pendapatan yang terjadi di Luwu Raya.

4. Composite Performance Index

Selanjutnya dari indeks alternatif ini dapat ditentukan composite performance index (CPI) yang menggambarkan daya saing masing-masing Kabupaten Kota di Luwu Raya. Hal ini dapat dilihat pada tabel 7. Bawah: Tabel 7. Composite Performance Index Pengolahan data dalam penentuan composite performance index menemukan bahwa Kota Palopo memiliki indeks komposit yang paling besar yakni 147,06% sedangkan daerah yang memiliki CPI terkecil adalah Kabupaten Luwu Utara, yaitu 99,64%. Untuk lebih jelasnya, perbandingan hasil CPI antar Kabupaten Kota dapat dilihat pada diagram di bawah ini: Gambar 2. Diagram Composite Performance Indeks (CPI) Dari diagram di atas, dapat dilihat bahwa terdapat ketimpangan yang cukup besar antara Kota Palopo dengan daerah lainnya. Ketimpangan indeks berada pada kisaran 48% (147,06% - 99,64%) dan tergolong ketimpangan yang cukup besar. Pada skala pengukuran ketimpangan pendapatan, jika indeks ketimpangan pendapatan lebih besar dari 30% maka diklasifikasikan sebagai ketimpangan sedang atau menengah dan jika lebih besar dari 50% maka diklasifikasikan sebagai ketimpangan besar. Hanya 2% selisih ketimpangan yang dapat dikategorikan sebagai

ketimpangan besar. Ketimpangan ini dapat dilihat pada grafik radar di bawah ini: Gambar 2. Grafik Radar Wilayah dengan CPI terbesar dan terkecil serta rata-rata Ketimpangan wilayah yang terjadi antara daerah dengan daya saing tertinggi, yaitu Kota Palopo dengan daerah berdaya saing terendah yaitu Kabupaten Luwu Utara tergambar pada grafik radar di atas dengan perbandingan rata-rata yang diantara keduanya. 1. Indeks Pembangunan Daerah Luwu Raya Dari hasil analisis indeks gabungan, indeks pembangunan daerah Kabupaten/Kota di Luwu Raya tergolong kurang merata. Hal ini dapat dilihat dari selisih akumulasi indeks gabungan dari indeks alternatif dengan CPI tertinggi dan terendah dengan selisih 48%. Sementara selisih CPI antara wilayah dengan CPI tertinggi yakni di Kota Palopo dan Kabupaten Luwu Timur sebagai wilayah dengan CPI tertinggi kedua setelah Kota Palopo yakni sebesar 26%. Selisih inipun cukup jauh, meninjau selisih antara CPI wilayah Luwu Utara sebagai wilayah dengan CPI paling rendah dan Kabupaten Luwu hanya sebesar 2%. Dari selisih CPI tersebut menggambarkan jurang ketimpangan Pembangunan wilayah di Luwu raya sekaligus menunjukkan wilayah mana yang paling berdaya saing diantara wilayah-wilayah yang ada di Luwu raya. Sementara indeks alternatif dapat menunjukkan indicator apa yang paling berperan dalam pembentukan daya saing di wilayah-wilayah tersebut.

Sources

2% Plagiarized

lingkungan ekonomi mikro. Selain itu, daya tarik investasi juga mempengaruhi daya saing suatu negara. Secara normatif, konsep daya saing daerah tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 yang menyebutkan bahwa daya saing daerah adalah kemampuan perekonomian daerah

<http://jurnal.magelangkota.go.id/index.php/cendelainovasi/article/download/94/46>



[Home](#) [Blog](#) [Testimonials](#) [About Us](#) [Privacy Policy](#)

Copyright © 2024 [Plagiarism Detector](#). All right reserved

Plagiarism Scan Report



Characters:7518

Words:993

Sentences:45

Speak Time:
8 Min

Excluded URL

None

Content Checked for Plagiarism

2. Daya Saing Wilayah Kabupaten Luwu Timur menjadi wilayah dengan CPI tertinggi kedua setelah Kota Palopo. Walaupun lokasinya lebih jauh dari Kota Palopo dibandingkan dengan dua Kabupaten lainnya namun Kabupaten Luwu Timur memiliki potensi wilayah yang sangat mendukung daya saing wilayah nya yakni potensi sektor pertambangan. Aspek yang perlu mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah setempat dalam Upaya Pembangunan yang berdaya saing di Kabupaten Luwu Timur adalah aspek sosial pemerataan pendapatan yang diukur dengan Rasio Gini. Berdasarkan hasil olah data yang diuraikan pada indeks alternatif, rasio gini menjadi indikator yang paling lemah yakni hanya sebesar 6,54%. Sementara infrastruktur yang diukur dengan data kondisi jalan mantap menjadi indikator yang paling menguatkan daya saing wilayah tersebut yakni sebesar 22,06%. Lalu disusul oleh indikator pendapatan perkapita yakni sebesar 17,73%. Banyaknya Perusahaan tambang yang beroperasi di Luwu Timur mendukung perbaikan infrastruktur yakni jalan mantap melalui dana CSR dan sekaligus menjadi kebutuhan operasional Perusahaan-perusahaan tambang tersebut. Sementara, tingginya pendapatan perkapita yang terjadi bersamaan dengan tingginya rasio gini di Kabupaten Luwu Timur menandakan bahwa pendapatan tinggi didominasi oleh golongan minoritas dan tidak terdistribusi secara merata. hal ini sejalan dengan penelitian (Zaini et al., n.d.) yang menyatakan bahwa kontribusi subsector batubara (pertambangan) dalam perekonomian berhubungan positif dengan ketimpangan pendapatan. Semakin tinggi kontribusi subsector batubara (pertambangan) dalam perekonomian, semakin tinggi pula ketimpangan pendapatan. Hal ini diperkuat oleh penelitian (Loayza Jamele Rigolini et al., 2016) Di Peru yang menyatakan bahwa pertambangan memperburuk distribusi pendapatan. Hal ini disebabkan sektor pertambangan memerlukan tenaga kerja yang memiliki keterampilan khusus dan penguasaan teknologi, karena tidak semua orang dapat menggunakan alat berat dan teknologi pertambangan lainnya terutama warga atau tenaga kerja lokal yang minim Pendidikan dan keterampilan. Oleh karena itu, pemerataan atau ketimpangan menjadi sebab masalah-masalah sosial lainnya seperti kemiskinan dan pengangguran di Kabupaten Luwu Timur. Hal ini dapat menjadi dasar bahwa Upaya Pembangunan di Kabupaten Luwu Timur seharusnya dipusatkan pada program-program pemerataan pendapatan melalui program-program penanggulangan kemiskinan dan pengangguran.

Sebaiknya penggunaan tenaga kerja lokal dapat menjadi alternatif solusi namun hal ini perlu juga didukung oleh peningkatan kompetensi sumber daya manusia melalui peningkatan kualitas Pendidikan dan Kesehatan yang menunjang. Kabupaten Luwu Utara menjadi wilayah yang paling lemah dari aspek daya saing wilayah di Luwu raya. Dengan nilai CPI yang hanya sebesar 99,06% dan merupakan wilayah dengan nilai CPI terendah diantara wilayah lainnya di Luwu raya. Dibandingkan dengan wilayah pemekarannya yakni Kabupaten Luwu Timur, selisih nilai CPI antara keduanya cukup jauh yakni sekitar 22%. Padahal Kabupaten Luwu Timur merupakan wilayah pemekaran dari Kabupaten Luwu Utara. Aspek yang paling berperan dalam rendahnya daya saing Kabupaten Luwu Utara yakni aspek sosial yang diukur dengan tingkat kemiskinan yakni hanya sebesar 3,86% yang disusul oleh rasio gini dan umur harapan hidup sebesar 7,5%. Rendahnya nilai CPI di Kabupaten Luwu Utara didominasi oleh sektor-sektor sosial ekonomi seperti tingkat kemiskinan, pendapatan perkapita, umur harapan hidup, rata-rata lama sekolah dan kondisi jalan mantap yang masing-masing memiliki indeks alternatif paling rendah jika dibandingkan dengan aspek yang sama di wilayah Luwu raya lainnya. Lemahnya aspek infrastruktur di Kabupaten Luwu Utara menyebabkan lemahnya berbagai aspek lainnya seperti Pendidikan dan Kesehatan yang berimbas pada tingkat kemiskinan dan masalah sosial ekonomi lainnya. Hal ini sejalan dengan penelitian (Faradis, 2020) yang menerangkan bahwa Pembangunan infrastruktur mutlak diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mengusung prinsip pro-poor, pro growth, dan pro-job Kota Palopo menjadi wilayah yang paling berdaya saing di Luwu raya dengan nilai CPI sebesar 147,06% dan menjadi wilayah dengan CPI tertinggi di Luwu raya. Dari data indeks alternatif menunjukkan bahwa infrastruktur menjadi komponen yang paling menunjang daya saing di Kota Palopo. Pembangunan yang berfokus pada infrastruktur ini mendukung peningkatan aspek Pendidikan yang bermuara pada peningkatan kualitas sumber daya manusia. Infrastruktur yang menunjang juga dapat berdampak positif pada kegiatan investasi, memperkuat produktifitas dan efisiensi bisnis, sehingga dapat menyerap tenaga kerja dan menstabilkan angka kemiskinan di Kota Palopo. Hal ini sejalan dengan penelitian (Andy et al., 2019) yang menyatakan bahwa pembangunan infrastruktur merupakan aspek penting dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi karena dapat menciptakan lapangan kerja baru, penurunan tingkat kemiskinan dan peningkatan pendapatan perkapita. Namun yang perlu diperhatikan bahwa dari aspek sosial ekonomi, Kota Palopo masih terjadi pertumbuhan ekonomi yang tidak inklusif. Dimana pertumbuhan ekonomi yang tinggi didominasi oleh golongan minoritas dan tidak merata penyebarannya. Tingkat pengangguran terbuka masih cukup tinggi dan termasuk wilayah dengan tingkat pengangguran tertinggi di Luwu raya. Dari data indeks alternatif, nilai TPT Kota Palopo hanya 5,54% sementara yang tertinggi yakni di Kabupaten Luwu dengan nilai indeks alternatif sebesar 10,91%. Sehingga pemerintah Kota Palopo perlu memfokuskan Pembangunannya pada pencapaian pertumbuhan ekonomi yang inklusif, yang dapat dirasakan oleh seluruh Masyarakat Kota Palopo dan

mempersempit jurang ketimpangan pendapatan di Masyarakat. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Retno et al., n.d.) yang menerangkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak menjamin bahwa semua orang akan menjamin bahwa semua orang akan memperoleh manfaat yang sama. Dewi Purwanti & Rahmawati, 2021) juga menerangkan dalam penelitiannya bahwa variabel pengeluaran pemerintah bidang pendidikan memiliki pengaruh yang berbanding terbalik terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif, Kabupaten Luwu berada pada peringkat ke 3 dari 4 daerah di Luwu raya dengan CPI terendah setelah Kabupaten Luwu Utara. Nilai CPI di Kabupaten Luwu Utara sebesar 101,09% dan hanya selisih 2% dari Kabupaten Luwu Utara. Kabupaten Luwu merupakan wilayah tertua di Luwu raya. Tapi tingkat daya saing wilayahnya sangat rendah. Terutama pada aspek infrastruktur yang menjadi nilai indeks alternatif paling rendah dari aspek kondisi jalan mantap di Luwu raya. Disusul oleh tingkat kemiskinan yang hanya bernilai 4,09% paling rendah setelah tingkat kemiskina di Luwu Utara dari hasil pengukuran indeks alternatif. Hal yang menjadi perhatian dari hasil pengukuran ini adalah tingginya tingkat kemiskinan di Kabupaten Luwu disertai dengan rendahnya jurang kesenjangan pendapatan di wilayah tersebut. Hal ini mengindikasikan bahwa kemiskinan yang terjadi di Kabupaten Luwu tersebar secara cukup merata. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian (Dinda Syahrir, 2020) yang menegaskan bahwa kemiskinan berpengaruh negatif dan terhadap ketimpangan pendapatan di Sumatera Utara. Namun berbeda dengan hasil penelitian (Handoyo Mulyo et al., 2015) Click or tap here to enter text. Kesenjangan (inequality) merupakan isu lain yang sering dikaitkan dengan kemiskinan.

Sources



[Home](#) [Blog](#) [Testimonials](#) [About Us](#) [Privacy Policy](#)

Copyright © 2024 [Plagiarism Detector](#). All right reserved

Plagiarism Scan Report



Characters:1752

Words:227

Sentences:9

Speak Time:
2 Min

Excluded URL

None

Content Checked for Plagiarism

3. PENUTUP Kesimpulan Berdasarkan hasil dan analisis pengukuran indeks pembangunan daerah di Luwu Raya, peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa Tingkat daya saing wilayah-wilayah di Luwu raya masih terdistribusi kurang merata. Dari hasil pengukuran Composite Performance Indeks, Kota Palopo menjadi wilayah dengan tingkat daya saing paling tinggi, sementara Kabupaten Luwu Utara menjadi wilayah dengan tingkat daya saing paling rendah dan hanya selisih tipis dengan Kabupaten Luwu. Adapun yang menjadi aspek paling berpengaruh terhadap daya saing dari wilayah-wilayah tersebut adalah aspek infrastruktur yang diukur dengan data kondisi jalan mantap dan penyaluran air bersih. Aspek infrastruktur menjadi indicator yang menjadi pioner dan dapat memberikan dampak positif maupun negative terhadap Pembangunan di Luwu Raya. Saran Berdasarkan hasil penelitian, dirumuskan beberapa rekomendasi untuk pihak-pihak yang berkepentingan, antara lain sebagai berikut: 1. Disarankan untuk penelitian lebih selanjutnya untuk dapat menambahkan indikator daya saing wilayah lainnya seperti Investasi dan Teknologi. 2. Disarankan kepada Pemerintah di Luwu Raya untuk memperhatikan pembangunan dan daya saing di wilayah yang berfokus pada infrastruktur, terutama infrastruktur Pendidikan, Kesehatan dan Sosial. 3. Direkomendasikan kepada pemerintah di Luwu Raya untuk memperkuat program penanggulangan kemiskinan melalui penguatan daya beli Masyarakat dan peningkatan penyerapan tenaga kerja yang dapat diwujudkan dengan pertumbuhan ekonomi inklusif di Luwu Raya 4. Disarankan kepada penyedia data dan informasi regional maupun nasional (Badan Pusat Statistik) untuk menyajikan data dan informasi terkait indeks Pembangunan daerah yang terukur secara komprehensif.

Sources



[Home](#)

[Blog](#)

[Testimonials](#)

[About Us](#)

[Privacy Policy](#)

Copyright © 2024 [Plagiarism Detector](#). All right reserved